

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andarini, Suparlinda, *Budaya Literasi Membaca dan Keterampilan Menulis Paragraf Siswa Sekolah Dasar*, Cet. 1, Margomulyo, Maghza Pustaka, 2021, hlm. 17.
- Arba, Haji, *Hukum Agraria Indonesia*, Cet. 2, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.
- Armia, Muhammad Siddiq, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, Aceh, Lembaga Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022.
- Arnowo, Hadi, Purwanto, *Pengantar Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pusdiklat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional*, Bogor, 2018.
- Artadi, I Ketut, *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya*, Cet. 6, Denpasar, Pustaka Bali Post, 2012.
- Bakri, Muhammad, *Pengantar Hukum Indonesia Jilid 2: Pembidangan dan Asas-Asas Hukum*, Cet. 1, Malang, UB Press, 2013.
- Fuardy, Munir, *Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2003.
- Gelgel, I Putu, Hadriani, Ni Luh Gede, *Hukum Perkawinan dan Waris Hindu*, Denpasar, UNHI Press, 2020.
- Hajati, Sri, Poespasari, Ellyne Dwi, dan Moechtar, Oemar, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, Surabaya, Airlangga University Press, 2017.
- Hertogh, March (ed.), *Living Law: Reconsidering Eugen Ehrlich*, Oxford, Hart Publishing, 2009.
- Irianto, Sulistyowati, *Pluralisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2017.
- Jaya, Dwi Putra, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, Bengkulu, Zara Abadi, 2020.
- Maiyestati, *Metode Penelitian Hukum*, Padang, LPPM Universitas Bung Hatta, 2022.
- Miharja, Marja, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Bandung, CV. Cendekia Press, 2023.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, 2020.

Mulyadi, Lilik, *Eksistensi dan Dinamika Hukum Adat Waris Bali Dalam Perspektif Masyarakat dan Putusan Pengadilan*, Bandung, Penerbit Alumnus, 2022.

Panetje, Gde, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, Cet. 3, Denpasar, CV. Kayumas Agung, 2004.

Safitri, Myrna A. (ed), *Untuk Apa Pluralisme Hukum?*, Jakarta, Epistema Institute dan HuMa Forest Peoples Programme, 2011.

Sembiring, Rosnidar, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, Cet. 4, Depok, PT. RajaGrafindo Persada, 2020.

Sudiana, I Gusti Ngurah, Windia, Wayan P., dan E., Relin D., *Prajuru Desa Pakraman Rohaniawan Hindu dan Hukum: Ketentuan Hukum yang Perlu Diketahui dan Dipahami Oleh Prajuru Desa Pakraman dan Rohaniawan Hindu*, Denpasar, Swasta Nulus, 2016.

Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2007.

Suparman, Ujang, *Bagaimana Menganalisis Data Kualitatif*, Lampung, Pustaka Media, 2020.

Suyadi, Yagus, *Menuntaskan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2023.

Warjiyati, Sri, *Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2018.

Windia, Wayan P., *Hukum Adat Bali Dalam Tanya Jawab*, Denpasar, Udayana University Press, 2013.

Windia, Wayan P., *Mengenal Hukum Adat Bali*, Tabanan, Pustaka Ekspresi, 2023.

## **Jurnal**

Anggreni, Komang Tria, Adnyani, Ni Ketut Sari, Sudiatmika, Ketut, “Akibat Hukum Perkawinan Nyentana Terhadap Hak Mewaris Laki-Laki di Keluarga Asalnya Dalam Perspektif Hukum Waris Bali”, *Jatayu: Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 4, No. 2, (Agustus 2021).

Ayu, Isdiyana Kusuma, “Kepastian Hukum Penguasaan Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 31, No. 3, (Oktober 2019).

Bija, I Gusti Ngurah Ratma, dan Sukerti, Ni Nyoman, “Hak Waris Anak Perempuan Pada Hukum Adat Bali Dalam Perspektif Gender”, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 9, No. 4, (Mei 2021).

- Dewi, Anak Agung Istri Ari Atu, “Potensi Hukum Adat: Peran Majelis Desa Pakraman (MDP) Bali Dalam Pembangunan Hukum Nasional”, *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 38, No. 3, (Desember 2016).
- Hanum, Latifah, Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris yang Dikeluarkan Kepala Desa Sebagai Alas Hak Dalam Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli (PJB) Oleh Notaris Bagi WNI Bumiputera, *Premise Law Jurnal*, Vol. 7, No. 7, (2016).
- Hisbullah, Rakhmat Wiwin, Patittingi, Farida, dan Aspan Zulfikli, Asas Publisitas Pada Pelaksanaan Program Nasional Agraria Dalam Rangka Mewujudkan Efektivitas Pelayanan Publik, *Madani Legal Review*, Vol. 2, No. 1, (Juni 2018).
- Jayendra, Putu Sabda, “Eksistensi Istilah “Anak Mula Keto” Dalam Kehidupan Beragama Masyarakat Hindu Bali”, *Pangkaja*, Vol. 20, No. 2, (Agustus 2017).
- Khairi, Mawardi, “Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan (Illegal Fishing) di Indonesia”, *Fiat Justisia*, Vol. 10. No. 2, (April-Juni 2016).
- Muchtar, Asikin, Wijaya, Indra, Wanggung, Robertus, dan Herawaty, “Pengaruh Sosial Ekonomi, Sosial Budaya, dan Lingkungan Fisik Mangrove Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pelestarian Mangrove Lentebung Kota Makassar”, *Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar*, Vol. 7, No. 1, (Januari-Juni 2023).
- Muhammad Rijal Fadli, “Memahami Desai Metode Penelitian Kualitatif”, *Jurnal Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol. 21, No. 1, (2021).
- Nandaria, Ni Putu Sawitri, Prasada, Dewa Krisna, Mahadewi, Kadek Julia, Anastasya, Putu Stefany, “Kedudukan Perempuan Sebagai Ahli Waris Berdasarkan Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP 2010 di Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan”, *International Conference Towards Humanity Justice for Law Enforcement and Dispute Settlement*, Vol. 1, No. 1, (Desember 2022).
- Rahmadita, Amira, dan Chayono, Akhmad, “Pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata dalam Pengakhiran dan Perjanjian Karena Wanprestasi: Studi Putusan-Putusan Pengadilan”, *Lex Patrimonium*, Vol. 2, No. 1, (Mei 2023).
- Rijali, Ahmad, “Analisis Data Kualitatif”, *Jurnal Ahadharah*, Vol. 17, No. 33, (Januari-Juni 2018).

Rinaldo, Ridho, Pujiastuti, Endah, dan Sukimin, “Implikasi Pengaturan Sistem Rujukan Berjenjang Terhadap Pelayanan Kesehatan atau Perorangan”, *Semarang Law Review (SLR)*, Vol. 1, No. 1, (April 2020), hlm. 12.

Sahlan, Sartono, “The Other Laws di Era Otonomi Daerah (Studi Antropologi Hukum)”, *Pandecta*, Vol. 5, No. 2, (Juli 2010).

Wedanti, I Gusti Ayu Jatiana, Saskara, I Putu Ada, dan Sugita, I Made, “Eksistensi Purusa dan Pradana Dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali”, *Widya Duta: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Budaya*, Vol. 18, No. 1, (Maret 2023).

Wisadnya, I Wayan, “Kedudukan Desa Adat Dalam Mekanisme Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, *Raad Kertha*, Vol. 01, No. 01, (Februari 2018).

### **Tesis**

Erina, Desy, “Pembagian Waris Wanita Dalam Hukum Waris Adat Bali Setelah Dikeluarkannya Keputusan Pasamuan Agung III MUDP Bali No. 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010 Di Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Bali”, *Tesis*, Universitas Gadjah Mada, 2013.

Sandy, Ida Ayu Surga, “Sistem Pewarisan di Desa Cempaga, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng Dalam Perspektif Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali No. 01/Kep/PSM-3 MDP Bali/X/2010”, *Skripsi*, Universitas Pendidikan Ganesha, 2020.

Sulastini, Ni Ketut, “Penerapan Keputusan Pesamuan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali No. 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 Tentang Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali (Studi di Wilayah Kerja Majelis Desa Pakraman Kabupaten Karangasem-Bali)”, *Tesis*, Universitas Brawijaya, 2019.

### **Internet**

Badriah, Siti, “Implikasi adalah: Pengertian Hingga Contohnya Kehidupan Nyata”, *Gramedia*, <https://www.gramedia.com/literasi/implikasi/>, (diakses pada 8 Mei 2024).

Hakim, Amrie, “Hak Waris Perempuan Menurut Hukum Adat Bali”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-waris-perempuan-menurut-hukum-adat-bali--lt4f6ac3987ac0e>, (diakses 11 Desember 2023).

Mauliady, Rahmat, “Sukseskan PTSL, Begini Strategi Baru Kementerian ATR/BPN”, <https://pontas.id/2021/05/28/sukseskan-ptsl-begini-strategi-baru-kementerian-atr-bpn/>, (diakses pada 11 September 2024).

Munawaroh, Nafiatul, “Perbuatan Hukum Bukan Perbuatan Hukum, dan Akibat Hukum”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-hukum-lt5ceb4f8ac3137/#>, (diakses pada 13 Mei 2024).

Permatasari, Erizka, “Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-lt4be012381c490/>, (diakses pada 25 Juli 2024).

Rahayu, Heni, “Artikel DJKN: Penggunaan Terbaik dan Tertinggi dalam Optimalisasi Aset”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-tarakan/baca-artikel/14694/Penggunaan-Terbaik-dan-Tertinggi-dalam-Optimalisasi-Aset.html>, (diakses pada 6 Agustus 2024).

Tim Hukum Online, “3 Sistem Kewarisan Adat: Individual, Kolektif, dan Mayorat”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-waris-perempuan-menurut-hukum-adat-bali--lt4f6ac3987ac0e>, (diakses pada 5 Mei 2024).

Tim Hukum Online, “Penggolongan Hukum Berdasarkan Kategorinya”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/penggolongan-hukum-berdasarkan-kategorinya-lt628ad37d3e75b/>, (diakses pada 16 September 2024).

Tim Hukum Online, “Sifat dan Karakteristik Hukum Adat di Indonesia”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sifat-dan-karakteristik-hukum-adat-lt6659ac85ac9d7?page=2>, (diakses pada 3 Agustus 2024).

Unair News, “Hukum dan Gender Tak Sejalan, Dosen UGM Beberkan Penyebabnya”, <https://unair.ac.id/hukum-dan-gender-tak-sejalan-dosen-ugm-beberkan-penyebabnya/>, (diakses pada 3 Agustus 2024).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696).

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29 Seri D Nomor 29).

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Nomor 4).

Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020, Nomor 4).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (Berita Negara Tahun 2021, Nomor 953).

Petunjuk Teknis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 3/Juknis-HK.02/III/2023 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tentang Hasil-Hasil Pesamuan Agung III Majelis Desa Pakraman (MDP) Bali.